

KOMUNIKASI POLITIK MUBALLIG DI KOTA PALU  
(Studi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015)

**Syamsuri Syamsuri**

email: [syamsuri.akil@gmail.com](mailto:syamsuri.akil@gmail.com)

**Suriati Suriati**

email: [suriatisuri802@rocketmail.com](mailto:suriatisuri802@rocketmail.com)

Dosen Tetap Pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palu

**Abstract:**

There are three social levels of Islamic preacher in Palu, *ulama*, *ustaz* and *guru mengaji*. The emergence of '*ulama* (muslim scholars) on the political stage is an epicenter of social, cultural and economic dynamics. '*Ulama* felt that they must interfere to guide Muslim community in politics in order to implement Islamic shari'a according to the Qurān and Hadith. Political communication of Muslim preachers in Palu includes three steps: negotiation of political opportunity, consolidation of supports for candidates, and image building of *da'wah* message. Muslim preachers such as *ulama*, *ustaz* and *guru mengaji* are always drawn into politics at the season of political glamour, because they are considered as having loyal and pious mass basis.

و توجد في مدينة بالو الطبقات الاجتماعية الثلاث والتي تشمل العلماء والأستاذ و مدرس القرآن. وظهور العلماء في المسارح السياسية هو المركز السطحي لديناميكية اجتماعية وثقافية واقتصادية. ويشعر العلماء أنه لا بد لهم أن يتدخلوا في السياسة في توجيه الأمة الإسلامية من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتبنى على القرآن والحديث النبوي. وكان الاتصال السياسي للداعية المسلمة بالو يشمل ثلاث خطوات وهي التفاوض من الفرص السياسية وتعزيز الدعائم للمرشحين و بناء صورة رسالة الدعوة. و يتشارك الداعية المسلمة مثل العلماء والأستاذ و مدرس القرآن دائما في السياسة لا سيما في موسم البرائق السياسية لأن لديهم أتباعا مخلصين صالحين.

**Kata Kunci :** *negosiasi, konsolidasi, dan pencitraan.*

## **A. Pendahuluan**

Dinamika politik pada setiap peristiwa pesta demokrasi selalu mengoptimalkan penggarapan seluruh unsur-unsur potensial di basis-basis pemilih. Sentimen emosional keagamaan dipandang oleh kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi sebagai sarana untuk mengokohkan kekuatan peraihan suara pada saat pemilihan. Muballigh sebagai tokoh informal dan informatif umat Islam selalu diikutsertakan dalam tim-tim kampanye untuk mengukuhkan kekuatan politik bagi kandidat tertentu.

Semangat aktivitas keagamaan umat Islam tidak luput dari incaran politisi sebagai sebuah komoditas politik dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu. Muballigh yang dianggap representasi masyarakat muslim segera dilibatkan dalam proses kemenangan even demokrasi lima tahunan. Ada muballigh yang masuk sebagai anggota Tim Sukses secara resmi dan ada yang dipolakan pada acara-acara tertentu saja (*hidden team*). Muballigh yang sudah menjadi anggota partai politik, wajib mengikuti keputusan pimpinan partai untuk mengkampanyekan pasangan calon yang didukungnya. Sedangkan muballigh yang pemimpin informal selalu didekati oleh partai pengusung untuk didaftar sebagai anggota Tim Sukses.

Keterlibatan muballigh di gelanggang politik dimaksudkan untuk menjabarkan sekaligus mengartikulasikan pandangan dunia, kepentingan, tujuan, dan potensi yang ditentukan secara historis dari umatnya. Ulama wajib membeladan merekonstruksi rakyat yang dibelanya sehingga memperoleh keadilan, kesederajatan, keindahan, dan kesejahteraan

dengan lahirnya satu pengakuan atas identitas umat. Ulama harus bekerja buat dunia umat mereka, berkorban buat kehidupannya.<sup>1</sup>

Ulama adalah strata tertinggi dalam profesi muballig. Ia menjadi rujukan pada strata di bawahnya yaitu ustaz. Selanjutnya di bawah ustaz ada strata muballig yang paling terdepan dan terloyal di kalangan umat yaitu guru mengaji.<sup>2</sup> Ketiga komponen ini senantiasa mengambil peran penting bagi keterpilihan kandidat dalam even pemilihan politik. Perjuangan muballig dalam lapangan politik selalu dimaknai sebuah jihad untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama keberpihakan politik anggaran dalam kegiatan pendidikan dan dakwah.

Di tengah-tengah masyarakat, ulama adalah aktor komunikasi yang dapat memainkan peran-peran perubahan sosial. Ia memiliki pengaruh kuat karena beberapa hal. Di antaranya adalah, ulama sebagai pemangku hokum Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hamper semua hubungan social dan personal. Masyarakat mempercayakan kepada ulama untuk memberikan bimbingan dalam hal pemberian nama bayi, perkawinan, perceraian, warisan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kota Palu adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, tidak pernah terlepas dari keriuhan dampak peta politik nasional. Keikutsertaan

---

<sup>1</sup>Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama ; Tafsir Kepemimpinan dan Dialektika Ulama-Negara*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), h. 47.

<sup>2</sup>Syamsuri, *Pola Komunikasi Kelompok Dalam Lapisan Stratifikasi Sosial Pada Komunitas Muballig di Kota Makassar*, (Bandung : Program Pascasarjana, 2011), 211

<sup>3</sup>Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia; Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, (Bandung : Rosdakarya, 2008), h. iii.

muballig dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai partisipasi dalam pembangunan nasional. Jaringan komando muballig sudah tertata dari tingkat pusat hingga ke daerah. Para muballig diikutkan dalam pelatihan memahami visi dan misi kandidat dukungannya supaya seiring sejalan dengan anggota tim sukses atau tim kampanye dalam koalisinya.

Para muballig di Kota Palu yang sudah menjadi aktivis partai, apalagi kalau sudah terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum 9 April 2014, harus memperlihatkan loyalitas partai supaya tidak diberi sanksi pemecatan, yang berakibat gugurnya keanggotaan parlemen. Sedangkan muballig anggota partai yang tidak terpilih menjadi anggota parlemen, ternyata memiliki pilihan terbuka untuk mendukung pasangan kandidat tertentu.

Fenomena keterlibatan muballig dalam peristiwa politik pemilihan kepala daerah, menambah khasanah cakrawala pemikiran politik Islam sebagai sebuah strategi dakwah. Penelitian di bidang ini memaparkan agenda akademik lokalitas, sehingga pembaca selanjutnya dapat memahami konteks politik lokal di Kota Palu. Muballig menjadi agen politik yang bersahaja, karena selalu bersama dengan khalayak umat Islam sebagai massa potensial.

## ***B. Islam dan Politik***

Muballig yang tampil dipentas politik merupakan ijtihad siyasah dalam rangka menegakkan kebaikan (*amar ma'rūf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*). Berbicara tentang politik Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari Islam. Selain sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga mempunyai peran historis yang tidak mungkin bias diabaikan dalam membentuk dan membangun

negeri Pancasila. Pada masa pra kemerdekaan umat Islam telah ikut berjuang memanggul senjata dalam rangka mengusir para penjajah. Banyak di antara tokoh-tokoh agama ini tampil senagai pemimpin, baik dalam peperangan maupun perjuangan diplomasi.

Intensitas keterlibatan Islam dalam politik mulai menonjol pada masa penjajahan Jepang. Jepang tampaknya lebih memilih kalangan Islam sebagai patronnya ketimbang kaum priyayi. Ini masuk akal, karena kalangan priyayi memiliki kedekatan dengan Belanda. Sedangkan Jepang mengusung semangat anti kulit putih dengan slogan, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemihakan Jepang kepada Islam, dimaksudkan agar umat Islam bersedia membantu Jepang mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh asing. Lalu, dilatihlah orang-orang Islam dalam hal kemiliteran.<sup>4</sup>

Komunikasi politik dalam Islam bermula ketika Nabi Muhammad Saw (selanjutnya disebut Nabi) melakukan pendekatan dengan masyarakat Madinah, akibat penolakan masyarakat Makkah terhadap dakwah Islamiyah. Selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi menawarkan ajaran Islam di Makkah, namun tidak mandapatkan respon positif. Justru yang terjadi adalah pengusiran Nabi dan pengikutnya yang memeluk Islam. Beberapa kali Nabi melakukan hijrah untuk mendapatkan suaka perlindungan dari kerajaan terdekat, seperti hijrah Nabi ke Tha'if, Habasyah, dan terakhir Madinah. Ini menunjukkan bahwa betapa kerasnya pergolakan politik suku Quraisy menghadapi perluasan ajaran Islam di Makkah.

---

<sup>4</sup>Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1985), h. 23.

Masyarakat Madinah menerima Nabi setelah dua kali melakukan perundingan resmi yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah I dan Bai'atul Aqabah II. Bai'atul Aqabah adalah pernyataan sikap orang-orang Madinah berjumlah 12 orang, datang di Makkah mendengarkan dakwah Rasulullah pada tahun ke-12 kenabian, dan memintanya untuk datang di Madinah. Bai'at itu terdiri atas lima hal, yaitu : (1) Tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatupun juga, (2) Tidak akan mencuri., (3) Tidak akan berzina, (4) Tidak akan membunuh anak-anak mereka, (5) Tidak akan berbohong.<sup>5</sup>

Bai'atul Aqabah menjadi jaminan kehidupan Nabi dan umat Islam di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Bai'atul Aqabah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya negara Madinah. Setelah perundingan dianggap matang bagi orang Islam Makkah, lalu disepakatilah Bai'atul Aqabah yang kedua.

Di sinilah dibuat lagi landasan ideologi yang juga terdapat lima dasar ("pancasila"), yaitu : (1) Siap mencegah keluarganya dan anak-anaknya sebagaimana mencegah diri mereka dari kemaksiatan, (2) Siap mendngar dan taat, (3) Siap menghadapi kesulitan dan kelapangan, (4) Siap melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, (5) Tidak takut menghadapi celaan orang-orang benci.<sup>6</sup>

Bandingkan dengan cikal bakal lahirnya Republik Indonesia, yang didahului oleh patokan ideologi yaitu lima sila. Lima dalam bahasa Sansekerta adalah Panca, sehingga dirangkai menjadi "Pancasila". Istilah Pancasila untuk pertama kali ditemukan dalam *Buku Sutasoma* karangan

---

<sup>5</sup>Muchtar Adam, *Ma'rifaturrasul*, (Bandung : Makrifat, 1428 H), h. 301.

<sup>6</sup>Ibid., h. 304.

Empu Tantular. Buku tersebut ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad XIV. Menurut Buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai dua pengertian. Pertama, berbatu sendi yang lima. Kedua, pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu : (a) dilarang melakukan kekerasan; (b) dilarang mencuri; (c) dilarang berjiwa dengki; (d) dilarang berbohong; (e) dilarang mabuk/minuman keras.

Buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular memberikan gambaran tentang kehidupan rakyat Majapahit yang hidup damai, tenteram, dan sejahtera. Kemakmuran Majapahit diungkapkan dengan istilah *gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja*. Adapun kehidupan yang beragam digambarkan dengan ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hama Dharma Mangrwa*, yang berarti “berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang bercerai berai”. Sejarah Kerajaan Majapahit mengisahkan tentang keberhasilan Maha Patih Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapa, yakni dapat mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila. Kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral Pancasila itulah kemudian dijadikan sumber pemikiran dalam merumuskan dasar negara Pancasila.

Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKPKI) yang berlansung pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat beberapa rumusan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh, sebagai berikut :

**Syamsuri Syamsuri & Suriati Suriati, *Komunikasi Politik Muballigh...***

a. Muhammad Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya yang berisikan lima asas dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut : (1) Peri Kebangsaan, (2) Perikemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, (5) Kesejahteraan Rakyat.

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo memperoleh kesempatan untuk menyampaikan buah pikirannya tentang dasar-dasar negara Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan Rakyat

c. Ir. Soekarno

Pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Soekarno menyebutnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila menurut Soekarno, adalah : (1) Kebangsaan Indonesia, (2)

Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Pada 22 Juni 1945, dibentuklah sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul / Perumus Dasar Negara. Anggotanya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, AA. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso. H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, dan Muhammad Yamin.

Setelah Nabi resmi hijrah dan menjadi penduduk Madinah, mulailah Nabi menyusun konstitusi yang dapat mempersatukan masyarakat Madinah yang terdiri atas beberapa kabilah dan suku, yang masing-masing memiliki pergerakan dan kepentingan politik tertentu. Sesudah Nabi hijrah di Madinah, umat Islam berhasil membangun suatu komunitas yang kemudian diakui sebagai sebuah negara, karena memiliki; dasar negara yaitu Bai'atul Aqabah, konstitusi yaitu Piagam Madinah, memiliki wilayah yang dulunya sebatas kota Madinah (seluas Masjid Nabawi sekarang) hingga meluas karena berhasil dalam peperangan, dan memiliki warga negara yang multikultur.

### ***C. Metodologi Penelitian***

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian komunikasi politik muballig di Kota Palu akan mengamati muballig-muballig ketika berinteraksi dengan tokoh dan pemeluk agama lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian teoritik komunikasi dakwah. Sebagai penelitian dengan pendekatan

interpretatif, salah satu alat analisisnya adalah etnografi. Penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang realistis, kompleks dan rinci. Pendekatan etnografi dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa realitas tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh ideologi lembaga atau kelompok.

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari upaya studi pustaka terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada dan relevan dengan penelitian ini yang menggunakan metode dokumentasi.

## 2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Wawancara, Observasi dan dokumentasi berupa analisis konten media yang berkaitan dengan penelitian ini.

### ***D. Negosiasi Politik Muballig***

Muballig di Kota Palu memiliki dua kesempatan dalam mengantarkan dukungan Pemilihan Kepada Daerah Serentak, yaitu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Palu. Sebelum berlangsungnya penetapan calon resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tengah dan KPUD Kota Palu, pada bakal calon sudah memasang baliho di pinggir-pinggir jalan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Bakal Calon Gubernur yang sudah memperkenalkan diri ke masyarakat, antara lain Longki Djanggola, Ahmad M. Ali, Rusdi Mastura,

dan Ihwan Datu Adam. Setelah pendaftaran bakal calon hingga penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, terdapat dua pasangan calon, yaitu :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 ; Rusdi Mastura–Ihwan Datu Adam, diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
2. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 ; Longki Djanggola–Sudarto, diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Bulan Bintang.

Melihat hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 2014, dari 12 Partai Politik yang ikut pemilihan, urutan pemenang adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PDIP, Partai Hanura, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB dan PKPI. Dukungan massa politik berdasarkan hasil pemilihan umum parlemen, dapat dihitung jumlah pemilih masing-masing pasangan kandidat. Pasangan calon pertama telah mengantongi dukungan sebanyak 398.256. Sedangkan pasangan calon kedua mengantongi dukungan sebanyak 348.136 suara.

Hitungan di atas kertas, dimenangkan kandidat pasangan nomor urut 1. Dukungan muballig terhadap Rusdi Ihwan (RI) datang dari Ketua Utama Alkhairaat, Sayid Saggaf Muhammad Aldjufrie. Muballig yang berstrata ulama dan Sayid (bangsawan Arab) ini memengaruhi dukungan para muballig yang bernaung di bawah panji lembaga Alkhairaat.

Adapun dukungan secara resmi dapat dilihat pada gambar berikut:



Dukungan politik tersebut menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Kota. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Oleh karenanya, Habib Saggaf menyampaikan alasan-alasannya, yang marak dimuat oleh media massa. Sebagaimana yang dimuat dalam *Harian Rakyat Sulteng* pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2015<sup>7</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

**“Ini Alasan Alkhairaat Mengeluarkan Maklumat Untuk Rusdi-Ihwan.**

PARIMO – Ketua utama alkhairaat Habib Saggaf Muhamad Aljufri membeberkan alasan untuk mengeluarkan maklumat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng ini. Dihadapan ratusan jamaah di Desa Pesona, Kecamatan Kasimbar, Parigi Moutong, Habib Saggaf menjelaskan bahwa keluarnya maklumat adalah sebuah kewajiban alhaerat untuk membela yang haq dan menunjukkan yang bathil.

” Saya merasa wajib untuk mengeluarkan maklumat, karena pilkada gubernur ini menyangkut yang Haq dan yang bathil. Saya berdosa jika tidak menyampaikan ini kepada kalian, saya berdosa, ” kata Habib Saggaf saat perayaan hari 1 Muharam bersama masyarakat Parimo dan Cagub Rusdi Mastura, 15 Oktober.

Menurut Habib Saggaf, setelah mengeluarkan maklumat dan menyampaikannya kepada semua abnau alhaerat, tugasnya sudah selesai. Ia berharap, para abnau alhaerat dan masyarakat Sulteng bisa memahami keinginan alkhairaat yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran.

” Tugas saya sudah selesai, saya sudah mengeluarkan Maklumat dan tidak pernah sebelumnya saya lakukan , ” tambahnya.

Soal kalah atau menang, Habib menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Ia percaya keputusan rakyat pada 9 Desember ini adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Dengan pilihan alhaerat mendukung Rusdi-Ihwan, ia berharap masyarakat bisa ikut mendukung kemenangannya.

Mendengar penyampaian itu, Cagub Sulteng Rusdi Mastura menangis. Para undangan pun dibuatnya terharu.

Cudi begitu sapaan akrabnya pun mengaku memiliki beban yang berat,

---

<sup>7</sup> <http://rakvatsulteng.com/ini-alasan-alkhairaat-mengeluarkan-maklumat-untuk-rusdi-ihwan/>, diakses tanggal 17 Oktober 2015

namun dengan dukungan alkhairaat melalui doa ulama dan rakyat Sulteng, ia yakin bisa menang pada Pilgub ini.

“Alhamdulillah saya bisa sehat dan kuat selalu. Terimakasih, terimakasih semuanya, ” katanya sambil mengusap tetesan air mata dengan surban dipundaknya. (zan)”.

Habib Saggaf adalah muballig dengan peringkat strata ulama. Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa stratifikasi sosial muballig ada tiga yaitu, ulama, ustaz, dan guru mengaji. Ketua Utama Alkhairaat memiliki hubungan silsilah dengan Nabi Muhammad Saw, merupakan posisi tertinggi pada korps muballig di Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan yang diberikan kepada Rusdi-Ihwan merupakan amunisi yang dahsyat bagi pasangan nomor urut 1.

Dukungan tersebut merupakan balas jasa dari cucu SIS Aljufri, atas perjuangan Rusdi Mastura semasih Walikota Palu mengusulkan pendiri utama Alkhairaat sebagai nama Bandar Udara Mutiara Kota Palu. Penyematan nama Bandar Udara Mutiara SIS Aldjufri di Kota Palu menandakan bahwa penetrasi politik muballig mampu mempengaruhi jantung kekuasaan di Kota Palu. Besarnya massa Alkhairaat mendorong Walikota Palu mengusulkan penambahan nama pendiri Perguruan Islam Alkhairaat pada Bandar Udara di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Akumulasi massa terkumpul dalam acara Haul Guru Tua setiap tahun setelah lebaran Idul Fitri, yakni pada setiap tanggal 12 Syawal penanggalan Hijriyah.

Pada tanggal 12 Syawal 1434 Hijriah bertepatan dengan 19 Agustus 2013 Miladiah, pada acara Haul Guru Tua di Kompleks Pengurus Besar Alkhairaat, Walikota Palu H. Rusdi Mastura, dalam pidatonya mengumumkan kepada massa Alkhairaat tentang penyematan nama Bandar Udara Mutiara SIS Aldjufri Kota Palu. Dia menyampaikan bahwa

SIS Aldjufri adalah mutiara, yang datang dari Negara Yaman ke Palu untuk menyampaikan ajaran Islam.

Sayid Idrus bin Salim (SIS) Aldjufri adalah muballig dari Hadramaut Yaman yang mendirikan Perguruan Islam Alkhairaat di Kota Palu. Organisasi ini mengembangkan pendidikan dan dakwah di kawasan timur Indonesia. Sehubungan dengan berdirinya cabang-cabang organisasi di berbagai daerah, dibentuklah Pengurus Besar Alkhairaat. Ini artinya bahwa Alkhairaat sudah menjadi organisasi massa (ormas). SIS Aldjufri berhasil melakukan transformasi sosial pada proses pengembangan dakwah di Kota Palu yang merambah pulau Maluku, Sofifi, Ternate, Papua, dan Kalimantan.

Pada kesempatan yang lain juga disampaikan leat media Antara Sulteng<sup>8</sup> sebagai berikut;

### **“Habib: Alkhairaat Dukung Rusdihwan Untuk Kepentingan**

#### **Umat**

Palu, ([antarasulteng.com](http://antarasulteng.com)) - Ketua Utama Pengurus Besar Alkhairaat Habib Sayid Saggaf Aljufri menjelaskan bahwa keputusannya mengeluarkan maklumat mendukung pasangan Rusdi Mastura-Ihwan Datu Adam (Rusdihwan) dalam Pilgub Sulteng, semata-mata untuk kepentingan umat, bukan kepentingan materi atau individu.

"Karena saat ini, putra terbaik Sulteng hanya Rusdi Mastura," kata Habib Saggaf menanggapi kekhawatiran sebagian orang jika pasangan Rusdihwan yang didukung Alkhairat, kalah dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.

Ia mengakui ada sejumlah orang yang khawatir pasangan Rusdihwan gagal meraih suara terbanyak dalam pilkada.

"Bagaimana kalau Cudy - panggilan akrab Rusdi Mastura - tidak menang, Alkhairaat akan malu. Bagi saya kalah menang soal kedua yang terpenting ketegasan untuk menyampaikan kebenaran. Dibutuhkan

---

<sup>8</sup><http://www.antarasulteng.com/berita/21714/habib-alkhairaat-dukung-rusdihwan-untuk-kepentingan-umat>

pemimpin yang peduli rakyat dan menyelesaikan masalah daerah, saya melihat Cudy dapat melakukan itu "ujarnya.

Sementara itu, Rusdi Mastura yang juga mantan Wali Kota Palu dua periode itu berharap bisa memenuhi harapan rakyat Sulteng, termasuk keluarga besar Alkhairaat untuk memimpin Sulteng lima tahun ke depan. Program pengentasan kemiskinan (zero poverty) dalam bentuk padat karya yang dicanangkan di Kota Palu sejak dua tahun terakhir akan menjadi salah satu program prioritasnya.

Menurut Cudy, besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah, seharusnya digali dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Potensi ini yang harus dimaksimalkan oleh pemimpin Sulteng sehingga tidak semata-mata mengharapkan bantuan dari pusat," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, katanya, pimpinan tertinggi Alkhairaat menghadiri kampanye pasangan nomor urut satu, Rusdihwan di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong yang dihadiri oleh ribuan simpatisan dan abnaukhairaat.

Dalam kampanye yang dirangkaikan dengan perayaan tahun baru Islam itu, hadir puluh Sekjen PB Alkhairaat Dr.Lukman Tahir, Sekjen Wanita Islam Alkhairaat Pusat, Sakinah Aljufri, Ketua WIA Kabupaten Buol Nurbaya dan Ketua Komda Alkairaat Parigi Moutong Hasyim Mahfud. Setelah Ketua Utama Alkhairaat memberi dukungan kepada Rusdi Ihwan, muncul foto di facebook pada akun "Majalah Alkhairaat Part I", yang menampilkan suasana kampanye kandidat Pasangan Nomor Urut 2 Longki Djanggola-Sudarto (Longki's). Ketua Umum Pengurus Besar Wanita Islam Alkhairaat (PB WIA), Hajjah Syarifah Sa'diyah Aldjufri tampil duduk bersama dengan Hajjah Zalzulmida Djanggola dengan latar belakang gambar Longki's.

Hajjah Syarifah adalah bibi dari Sayid Saggaf Aldjufri, yang menandai bahwa keluarga besar Alkhairaat ikut serta memeriahkan kontes pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Keterlibatan secara langsung, dapat memberikan pelajaran politik kepada masyarakat bahwa

politik harus dikelola dengan baik, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik bukan hal yang tabu dinegosiasikan oleh ulama, untuk memperoleh hakikat kehidupan yang menghambakan diri kepada Allah SWT.

### ***E. Konsolidasi Dukungan Kandidat***

Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Palu, juga dimeriahkan oleh beberapa muballig di Kota Palu. Ada empat pasangan kandidat yang bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015. Adapun keempat pasangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Palu, yaitu :

1. Hadianto Rasyid – Wiwiek Jomiatul Rofiah, diusung oleh Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2. Habsayanti Ponulele – Thamrin Samauna, diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PDIP
3. Hidayat – Sigit Purnama Said, diusung oleh PKB dan PAN
4. Mulhanan Tombolotutu – Tahmidy Lasahido, diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Partikular muballig di kontes pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu, tidak melibatkan muballig non partai secara langsung seperti pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Muballig yang terlibat langsung dalam konsolidasi dukungan kandidat adalah muballig yang memang anggota dari partai pengusung.

Bey Arifin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu dari Fraksi Partai Hanura, menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Partai Keadilan Sejahtera sebagai pengusung Nomor 1 adalah partai dakwah, yang mutlak seluruh

anggotanya berprofesi sebagai muballig. Wiwiek Jomiatul Rofiah sebagai Calon Wakil Walikota adalah muballig dan murabbi di Kota Palu. Beberapa majelis taklim menjadi binaannya antara lain Majelis Taklim Nurul Alif Kelurahan Silae. Di majelis taklim ini, Wiwik menjadi penceramah tetap setiap bulan yang mengajarkan Fiqh Wanita, supaya perempuan memahami kewajiban dan haknya berdasarkan ajaran Islam.

Pada pasangan Nomor Urut 2, markas basis pemilih di Palu Barat juga melibatkan muballig dalam konsolidasi mendukung Habsa. Ustaz Saiful, pegawai Masjid Nur Jalan SIS Aljufri, tampil menjadi tim pemenangan Nomor Urut 2. Kedekatan dengan orang-orang Bugis-Makassar (disebut orang Selatan, karena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan), membuat semangat Habsayanti untuk menjadi Walikota Palu, kendati harus meninggalkan jabatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Nomor Urut 3, tampil artis ibukota Sigit Purnnama Said, yang populer dengan nama “Pasha Ungu”. Ikon inilah yang menjadi simbol kampanye yaitu Dasi Ungu (Hidayat Sigit Untuk Ngata Palu). Peluang keterlibatan muballig di Pasangan Kandidat ini, terlihat ketika antusia jamaah dan pegawai syara’ beberapa masjid di Kota Palu yang antusias menyambut Hidayat - Sigit.

Pasangan Nomor Urut 4, terdapat muballig, Muhammad Juraid Wartabone, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai Golkar. Wartabone adalah Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Berzikir, yang memiliki anggota Majelis Taklim di Kota Palu dengan jumlah anggota sebesar 11.232 orang, ini sangat potensial dan terbukti mengantarkan Wartabone sebagai anggota DPRD selama tiga periode.

## **F. Pencitraan Pesan-Pesan Dakwah**

Muballig tampil di gelanggang politik merupakan rangkaian dari penyeruan agama Islam untuk diamankan secara *kaffah*. Gun Gun Heryanto mengemukakan hal-hal pencitraan pesan-pesan dakwah pada artikel sebagai berikut :

“Gelembung Politik DPR”,<sup>9</sup>

Dalam perspektif komunikasi politik, guliran isu harus dibaca dialektika kontekstualnya. Hal ini, terhubung dengan momentum yang memang sengaja diciptakan agar mendapat resonansi atau gaung di media massa, media sosial dan perbincangan publik lainnya. Gaung politik yang ditiupkan lewat media massa bahwa revisi UU No 30/2002 tentang KPK merupakan kebutuhan mendesak sehingga harus masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015, usulan dana aspirasi yang dikesankan prorakyat, serta memengaruhi opini soal kesiapan KPU menyelenggarakan pilkada serentak, bisa kita maknai sebagai permainan opini publik.

Sebagian besar politisi sangat paham bahwa hal dominan dalam politik adalah persepsi publik, sehingga beragam operasi mengendalikan opini dianggap sangat penting. Maxwell McCombs dan Donald L Shaw dalam tulisan klasik mereka “The Agenda Setting Function of Mass Media” yang dipublikasikan *Public Opinion Quarterly* pada 1972 mengungkapkan, jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, media akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.

Perspektif *agenda setting* memandang media massa bisa memengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Namun, nyatanya, upaya para politisi melakukan operasi pengendalian opini telah gagal! Reaksi publik tetap keras dan memandang ketiga agenda tadi sesungguhnya tak dalam bingkai prorakyat melainkan strategi mengamankan diri dan kelompok mereka semata. Konteks lain yang juga menarik dibaca adalah situasi transisi pemerintahan. Secara faktual, pergantian rezim kekuasaan dari SBY ke Jokowi masih menyisakan sejumlah persoalan. Pemerintahan Jokowi-JK belum sampai di titik keseimbangan politiknya. Meski sudah melewati fase turbulensi saat tinggal landas Kabinet Kerja, Jokowi masih dihadapkan sejumlah tekanan elite partai di dalam dan di luar koalisi.

---

<sup>9</sup><http://print.kompas.com/baca/2015/07/08/Gelembung-Politik-DPR>. 08 Juli 2015

Para politisi sangat paham, situasi acak seperti sekarang, memungkinkan mereka memasang sejumlah jerat politik atas nama konsensus. Tesis Arend Lijhart dalam *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (1999) menyebutkan, realitas masyarakat majemuk yang tak ada partai dominannya, cenderung menggunakan demokrasi model konsensus. Jeratan konsensus di banyak kasus, selain politik akomodasi dalam koalisi juga upaya menciptakan zona nyaman kekuasaan. Prinsip "semua senang, semua menang" menyebabkan pemerintah tersandera politisi.

Pencitraan muballig di pentas politik merupakan nuansa yang tak terelakkan, karena muballig juga manusia. Manusia butuh ruang ekspresi untuk memantulkan sikap dan pekerjaannya, dalam rangka mengarungi samudra kehidupan. Politik adalah makna otoritas kehidupan yang harus dipelihara dan diperjuangkan.

## **F. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan tentang Komunikasi Politik Muballig di Kota Palu (Studi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negosiasi yang dilakukan oleh muballig di Kota Palu untuk tampil menyampaikan kampanye, yakni dengan (a) menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan kandidat bagi muballig yang menjadi anggota partai peserta pemilihan umum, (b) menyisipkan pesan-pesan politik untuk keterpilihan salah satu kandidat, bagi muballig yang menaruh simpatik kepada salah satu pasangan kandidat.
2. Konsolidasi politik yang dilakukan oleh muballig dengan (a) membangun komunikasi dengan sesama pengurus partai, bagi muballig yang menjadi anggota partai peserta pemilihan umum, (b) memperkuat soliditas hubungan emosional etnis bagi muballig simpatisan salah satu pasangan kandidat.

3. Pencitraan politik yang dilakukan oleh muballig terhadap pasangan kandidat dilakukan secara tampak (eksplisit) bagi muballig politikus dan pencitraan dilakukan secara sentilan (implisit) bagi muballig non partisan.

### Daftar Pustaka

- Adam, Muchtar, *Ma'rifaturrasul*, Bandung : Makrifat, 1428 H.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya : Insan Cendekia, 2002.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1985.
- Benyamin, Benny Ahmad, *Peran Pendidikan Politik Melalui Kajian Fiqh Siyash dalam Membentuk Budaya Politik (Suatu Studi Etnografi pada Komunitas Hizbut Tahrir Indonesia Cabang Cianjur)*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2010.
- Berger, Peterr and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, USA : Penguin Books, 1979.
- Hidayat, Komaruddin dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama ; Tafsir Kepemimpinan dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta: Jelasutra, 2004.
- Ibnu Hisyam, Muhammad Abi Muhammad 'Abd Al-Malik, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, Mesir : Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1926, Juz II.
- Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung : Widya Padjadjaran , 2009.
- , *Metode Penelitian Etnografi*, Bandung : Widya Pajajaran, 2008.

**Syamsuri Syamsuri & Suriati Suriati**, *Komunikasi Politik Muballigh...*

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2009.

Muhtadi. Asep Saeful, *Komunikasi Politik Indonesia; Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung : Rosdakarya, 2008.

Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Bandung : Rosdakarya, 2008.

Ritzer, Georger, *Sosiologi Modern*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

Sulthan, Muhammad, *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Fenomena Komunikasi Pemasaran Politik di Bandung*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2010.

Syam, Nina Winangsih, *Sosiologi Komunikasi*, Bandung : Lentera, 2009.

Syamsuri, *Pola Komunikasi Kelompok Dalam Lapisan Stratifikasi Sosial Pada Komunitas Muballigh di Kota Makassar*, Bandung : Program Pascasarjana, 2011.